

## **Analisis Standar Satuan Harga (SSH) Pada Penyusunan Anggaran Belanja Bimtek (Studi Kasus Badan Keuangan Kota Gorontalo)**

**Raflina Yuniarti Dai<sup>1</sup>, Zulkifli Boku<sup>2</sup>, Mulyani Mahmud<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup>, Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis standar satuan harga (SSH) pada penyusunan anggaran belanja bimtek. Standar Satuan Harga (SSH) merupakan acuan yang digunakan oleh pemerintah untuk penganggaran proyek dan pemesanan barang dan jasa. Objek penelitian ini adalah studi kasus pada kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada data Rincian Anggaran Belanja (RAB), Nota Pencairan Dana, serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan data Standar Satuan Harga berdasarkan Peraturan Wali Kota Gorontalo. Analisis data yang dilakukan menggunakan perhitungan SSH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Satuan Harga Pada Penyusunan Anggaran Belanja Bimtek sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022. Anggaran untuk belanja Bimtek dinilai sudah efektif karena pihak badan keuangan sudah menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan terutama untuk kegiatan Bimtek sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Perhitungan SSH di tahun 2022 dapat dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan penyusunan SSH untuk tahun selanjutnya.

**Kata Kunci:** *Standar Satuan Harga (SSH); Penyusunan Anggaran; Bimtek.*

Copyright (c) 2023 Diana Lestari

---

✉ Corresponding author :  
Email Address : [dianalestari5698@gmail.com](mailto:dianalestari5698@gmail.com)

### **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan upaya untuk memberdayakan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Perencanaan keuangan daerah diwujudkan dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH), dan standar pelayanan minimal memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan

program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Untuk melaksanakan penganggaran yang berbasis kinerja pemerintah daerah perlu melengkapi diri dengan suatu instrument yaitu dengan menyusun standar biaya yaitu Standar Satuan Harga (SSH). Dalam menyusun suatu dokumen diperlukan standarisasi supaya adanya keseragaman antara dokumen yang satu dengan yang lainnya. Standar satuan harga (SSH) diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, Pasal 93 Ayat (5) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Standar satuan harga adalah barang dan standar biaya merupakan instrument yang diperlukan dalam menyusun rencana kerja anggaran pemerintahan, mengingat pentingnya standar satuan harga barang dan standar biaya yang disusun diharapkan mampu memenuhi seluruh kebutuhan penganggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Standar Satuan Harga (SSH) bertujuan untuk menyeragamkan biaya atau harga dan jasa, terciptanya suatu peraturan Walikota/Bupati yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman perencanaan kegiatan utamanya belanja barang dan jasa bagi SKPD sehingga lebih terkoordinir dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan sesuai harga pasar. Harga satuan barang yang tertera pada SSH tersebut merupakan harga tertinggi yang sudah termasuk pajak didalamnya. Dengan tujuan agar masing-masing SKPD dapat menetapkan pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Beberapa SKPD sebagian besar menganut Standar Harga Satuan (SSH) dengan menyesuaikan jumlah barang yang dibelanjakan. SSH sangat penting karena tidak menutup kemungkinan harga beberapa barang berfluktuasi di pertengahan tahun anggaran. Beberapa permasalahan umum yang sering terjadi dalam penyusunan anggaran antara lain: (1) Ketidakjelasan tujuan dan prioritas (2) Kurangnya data dan informasi (3) Kurangnya partisipasi dan koordinasi (4) Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, juga terdapat permasalahan pada penggunaan SSH yaitu: (1) Ketidakakuratan SSH: SSH yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan harga pada proyek konstruksi atau kegiatan pembangunan lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan dana publik yang tidak efektif dan efisien, serta menimbulkan potensi kerugian keuangan. (2) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan SSH dapat menyebabkan praktik mark up harga atau pemotongan kualitas bahan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan bagi negara dan masyarakat. (3) Kurangnya pembaruan SSH: Kurangnya pembaruan SSH secara teratur dapat menyebabkan ketidakakuratan dan ketidaksempurnaan SSH yang digunakan. (4) Kurangnya pemahaman dan penggunaan yang tepat: Kurangnya pemahaman dan penggunaan SSH yang tepat dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan SSH pada proyek konstruksi atau kegiatan pembangunan lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan penentuan harga dan penggunaan dana publik yang tidak efektif dan efisien.

Anggaran

Menurut Mulyadi (2012), anggaran adalah rencana keuangan yang

mengumpulkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu dalam kaitannya dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Agar anggaran dipahami sebagai strategi keuangan untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan atau organisasi untuk memenuhi tujuannya. Selain itu, menurut Hansen dan Mowen (2009), anggaran adalah rencana terdokumentasi yang menguraikan tujuan keuangan yang harus dipenuhi serta langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukannya. Definisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa anggaran adalah rencana keuangan yang mencakup perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Anggaran juga menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi tujuan keuangan yang telah ditetapkan.

#### Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kebijakan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Ini termasuk memberi mereka kekuatan, tanggung jawab, dan sumber daya untuk menetapkan prioritas pengelolaan pemerintah, ekonomi, dan pembangunan daerah mereka. Selain untuk mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan keunikan, kebutuhan, dan potensi masing-masing daerah, otonomi daerah juga bertujuan untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, sumber daya, dan keuangan daerah, mengatur tentang pemberian otonomi daerah di Indonesia. Sebagai hasil dari penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah kini bertanggung jawab untuk membangun pemerintahan yang efektif, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dan mempercepat pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, otonomi daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di daerah.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada data Realisasi Anggaran tahun 2022 untuk kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo dan data Standar Satuan Harga berdasarkan Peraturan Wali Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis standar satuan harga (SSH) pada penyusunan anggaran belanja bimtek. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan penelitian ini bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis untuk suatu penelitian. Objek penelitian ini ialah Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo. pada saat melakukan penelitian standar satuan harga ini perlu adanya metode penelitian untuk melihat bagaimana standar satuan harga terutama dalam penyusunan anggaran belanja Bimtek.

- **Data Sekunder**

Data yang sudah tersedia dari sumber yang telah dianalisis atau diolah oleh pihak lain disebut data sekunder, menurut Sugiyono (2017). Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan peneliti, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Data yang digunakan dalam penelitian ini seperti mengenai Rincian Anggaran Belanja

(RAB), Nota Pencairan Dana, serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

- **Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dilakukan setelah pengumpulan data. Penulis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk mengolah dan menganalisis data yang telah mereka kumpulkan, menggambarkan data persis seperti apa adanya tanpa membuat generalisasi atau penilaian apa pun. (Sugiyono, 2018). Analisis penetapan harga unit standar menggunakan teknik statistik deskriptif adalah jenis analisis yang digunakan.

Berikut ini langkah-langkah analisis yang dilakukan:

1. Pengumpulan data yaitu dengan menyusun seluruh persiapan operasional SSH untuk data Bimtek yang diperlukan untuk proses penelitian.
2. Pemilihan data: Setelah data belanja dikumpulkan, data dipilih dan dikategorikan sesuai dengan sifat kegiatan.
3. Analisis data: Penulis memeriksa semua data yang tersedia dan kemudian mengkategorikannya sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menghitung Harga Satuan Standar dari setiap biaya yang termasuk dalam operasi Bimtek setelah data dikumpulkan dan dikategorikan menurut setiap kategori pengeluaran. Menggunakan metode statistik deskriptif, harga satuan standar diperiksa.
4. Simulasi Perhitungan, setelah dilakukan analisis data kemudian akan dilakukan simulasi perhitungan analisis standar belanja menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengetahui penentuan standar satuan harga dalam Penyusunan Anggaran Belanja Pada Kegiatan Bimtek.  
Adapun perhitungan yang digunakan dalam standar satuan harga yaitu:
  - a. Perhitungan standar satuan harga yaitu

$$Y = a + b + c$$

Keterangan:

**Y = Total standar satuan harga**

**a = Harga Tertinggi**

**b = Keuntungan Pihak Ketiga (10%)**

**c = Inflasi (3,11)**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Tahapan Penelitian*

Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan analisis data yaitu:

- a. Pengumpulan data dan Pemilihan data:

Pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan semua data yang terlibat dalam penyusunan SSH. Setelah itu dilakukan klasifikasi data berupa Belanja sesuai dengan jenis kegiatan. Pada penelitian ini menggunakan sumber data yang dimana menggunakan belanja Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Bidang Anggaran yang dilakukan pada tahun 2022 Di Bali. Berikut rincian belanjanya:

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	711.600
2.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak(Baliho)	3.992.500
3.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata (Plakat)	3.000.000
<b>Total</b>		<b>7.704.100</b>

Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo

b. Analisis data dan Perhitungan Standar Satuan Harga

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat rincian belanja pada kegiatan Bimbingan Teknisterdiri dari: Belanja alat tulis kantor, Belanja Bahan Cetak dan Belanja Suvenir/Cendera Matadengan total belanja sebesar Rp 7.704.100. rincian belanja tersebut dapat dihitung menggunakan Standar Satuan Harga untuk menilai apakah belanja tersebut sudah sesuai dan mengikuti standar satuan harga yang berlaku pada Pemerintahan Kota Gorontalo. Dengan melakukan perhitungan standar satuan harga untuk dapat menyajikan data-data tersebut menjadi sebuah hasil penelitian. Berikut hasil perhitungan SSH:

1. Perhitungan Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Bimtek: Tabel 4. 2 Belanja Alat Tulis Kantor untuk kegiatan Bimtek

No	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Ballpoint Baliner Spesifikasi : Hitam	1 Dus	224.000	224.000
2.	Map Ordner	1 Buah	31.200	31.200
3.	Binder Clips Spesifikasi: No. 200	11 Dus	14.800	162.800
4.	Map Batik	2.2 Pak	104.100	229.000
5.	Paper Clips Spesifikasi: Kecil	11 Dus	3.400	37.400

6.	Type Ex Spesifikasi: Kertas	11 Buah	13.600	27.200
<b>Total</b>			<b>711.600</b>	

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo

Dari perhitungan belanja alat tulis kantor diatas maka peneliti ingin melihat apakah belanja tersebut sudah sesuai dengan standar satuan harga yang sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

$$Y = a + b + c$$

**Y = Total standar satuan  
harga = Harga Tertinggi  
b = Keuntungan Pihak Ketiga  
(10%)c = Inflasi (3,11)**

Berikut perhitungan SSH:

$$\text{Ballpoint Baliner : } 198.000 + 19.800 + 6,158 = 223.957 \longrightarrow 224.000$$

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim penyusun SSH di beberapa tokoyang ada di kota gorontalo mengenai harga ballpoint baliner maka harga tertinggi yang disepakati oleh tim penyusun SSH sebesar Rp 198.000/dus, selain itu ditambahkankeuntungan pihak ketiga sebesar Rp 19.800 dan inflasi sebesar 6,158 sehingga standar satuan harga untuk ballpoint baliner yaitu sebesar 224.000/dus.

$$\text{Map Ordner : } 27.500 + 2.750 + 855 = 31.105,25 \longrightarrow 31.200$$

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim penyusun SSH di beberapa toko yang ada di kota gorontalo mengenai harga map ordner maka harga tertinggi yang disepakati oleh tim penyusun SSH sebesar Rp 27.500/buah, selain itu ditambahkan keuntungan pihak ketiga sebesar Rp 2.750 dan inflasi sebesar 855 sehingga standar satuan harga untuk map ordner yaitu sebesar 31.200/buah.

$$\text{Binder Clips : } 13.000 + 1.300 + 404 = 14.704,30 \longrightarrow 14.800$$

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim penyusun Standar Satuan Harga di beberapa took yang ada di kota gorontalo mengenai harga Binder Clips maka harga tertinggi yang disetujui oleh tim penyusun SSH sebesar Rp 13.000/dus, selain itu ditambahkan keuntungan pihak ketiga sebesar Rp 1.300 dan inflasi sebesar 404 sehingga

standar satuan harga untuk Binder Clips yaitu sebesar Rp 14.800.

$$\text{Map Batik : } 92.000 + 9.200 + 2,861 = 104.061,20 \longrightarrow 104.100$$

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim penyusun SSH di beberapa toko yang ada di kota gorontalo mengenai harga Map Batik maka harga tertinggi yang disetujui oleh tim penyusun SSH sebesar Rp 92.000/pak, selain itu ditambahkan keuntungan pihak ketiga sebesar Rp 9.200 dan inflasi sebesar 2,861 sehingga standar satuan harga untuk map ordner yaitu sebesar Rp 104.100/pak.

$$\text{Paper Clips : } 3.000 + 300 + 93 = 3.393,20 \longrightarrow 3.400$$

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim penyusun SSH di beberapa toko yang ada di kota gorontalo mengenai harga Paper Clips maka harga tertinggi yang disepakati oleh tim penyusun SSH sebesar Rp 3.000/dus, selain itu ditambahkan keuntungan

pihak ketiga sebesar Rp 300,00 dan inflasi sebesar 93 sehingga standar satuan harga untuk

map ordner yaitu sebesar Rp 3.400/dus.

$$\text{Type Ex : } 12.000 + 1.200 + 373 = 13.573,20 \longrightarrow 13.600$$

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim penyusun SSH di beberapa toko yang ada di kota gorontalo mengenai harga Type Ex maka harga tertinggi yang disetujui oleh tim penyusun SSH sebesar Rp 12.000/buah, selain itu ditambahkan keuntungan pihak ketiga sebesar Rp 1.200 dan inflasi sebesar 373 sehingga standar satuan harga untuk Type Ex yaitu sebesar Rp 13.600/buah.

2. Perhitungan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor berupa Bahan Cetak

Tabel 4.3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor berupa Bahan Cetak untuk kegiatan Bimtek

No	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Baliho	2 buah x 8 Meter	21.093	337.500
2.	Cetak Tumblr	100 buah	13.750	1.375.000
3.	Id Card	100 buah	22.800	2.280.000
<b>Total</b>				<b>3.992.500</b>

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo

Berikut perhitungan SSH:

$$\text{Plakat : } 562.000 + 56.200 + 1,747 = 619.917 \longrightarrow 620.300$$

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim penyusun SSH di beberapa toko yang ada di kota Gorontalo mengenai harga Plakat maka harga tertinggi yang disetujui oleh tim penyusun SSH sebesar Rp 562.000/buah, selain itu ditambahkan keuntungan pihak ketiga sebesar Rp 56.200 dan inflasi sebesar 1,741 sehingga standar satuan harga untuk map ordner yaitu sebesar Rp 620.000/buah. Selain perhitungan Standar Satuan Harga untuk Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak dan Suvenir terdapat Standar Biaya Umum untuk kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di Provinsi Bali yaitu seperti Belanja Makan dan Minum Rapat, Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, serta Belanja Perjalanan Dinas Biasa sehingga Anggaran untuk kegiatan Bimtek lebih besar dari Rp 7.712.000 namun peneliti hanya berfokus untuk meneliti perhitungan SSH.

## SIMPULAN

Hasil dari perhitungan standar satuan harga pada belanja bimtek yaitu meliputi Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor berupa Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor berupa Suviner (Cendera Mata) sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Pasal 8 Tahun 2022 tentang standar satuan harga yang berisi mengenai standar satuan harga tertinggi barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022. Dari Peraturan Wali Kota Gorontalo tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja tidak boleh melewati atau melebihi batas maksimum dari standar satuan harga yang berlaku di daerah tersebut. Anggaran untuk Belanja Alat tulis Kantor, Belanja Bahan Cetak dan Belanja Suviner dinilai sudah efektif karena pihak badan keuangan sudah menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan terutama untuk kegiatan Bimtek sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dikarenakan pihak badan keuangan membeli barang sesuai dengan standar satuan harga yang ada bahkan harga barang yang dibeli lebih rendah dibandingkan dengan harga yang sudah tertera dalam standar satuan harga

## Referensi :

- Darmayasa, I. N. (2013). *Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Kabupaten Jembrana I Nyoman Darmayasa Jurusan Akuntansi , Politeknik Negeri Bali Jalan Kampus Bukit Jimbaran , Kuta Selatan , Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Ke-2 Pemberlakuan Otonomi Daerah Dan Desentralis. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Ke-2, 17-18.*
- Manalu, ruth gok maria, Heriyanto, M., & Farida, L. (2018). stans]dar belanja (ASB) pada penyusunan anggaran belanja bimtek dan pelatihan. In *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 14).
- Nurofik, A., Rahajeng, E., Munti, N. Y. S., Hardiansyah, A., Firmansyah, H., Sani, A., ... & Wiyono, A. S. (2021). PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI. Penerbit Insania.
- Sani, A. (2017). Sistem Manajemen Otomasi Perpustakaan Berbasis Open Source Senayan Library Management System (SLiMS)(Studi Kasus Perpustakaan H. Bata Ilyas STIE AMKOP Makassar). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 1(1),

47-65.

- SYARIFUDDIN, S., ILYAS, J. B., & SANI, A. (2021). PENGARUH PERSEPSI PENDIDIKAN & PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA KANTOR DINAS DIKOTA MAKASSAR. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 1(2).
- Boediman, S. F., Hendriarto, P., Satmoko, N. D., Sulistiyani, S., & Sani, A. (2021). The Relevance of Using Social Media Applications Strategies to Increase Marketing Potential of Indonesian Maritime Tourism (Analytical Study of Tourism Journals and Online Marketing). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 8791-8799.
- Majid, A., & Sani, A. (2016). Pengaruh Pelatihan dan Supervisi Kepala Ruangan terhadap Kinerja Perawat Pelaksana Diruang Rawat Inap Bedah Rumah Sakit TK. II Pelamonia Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 1(2), 310-412.
- Sani, A., & Hafidah, A. (2020). Pengaruh Shopping Life Style Dan Fashion Involvement Terhadap Impulse Buying Behavior Masyarakat High Income Makassar. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 20(3), 231-238.
- Irsan, I., & Sani, A. (2018). Praktik Manajemen Pengetahuan Pustakawan Dalam Mengembangkan Koleksi Lokal Makassar Di Dinas Perpustakaan Kota Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 3(1), 121-135.
- Munir, M., Fachmi, M., & Sani, A. (2020). Pengaruh Disiplin Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Mirai Management*, 5(3), 161-170.
- Syarifuddin, U., Ilyas, G. B., Misbahuddin, M., Mustafa, H., & Sani, A. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Kerajinan Anyaman Rotan dan Bambu melalui Pemasaran Online di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 2(2), 1-24.
- Boediman, S. F., Hendriarto, P., Satmoko, N. D., Sulistiyani, S., & Amar Sani, A. S. (2021). Relevance of social media applications as a marketing strategy for Indonesian tourism destinations (literature analysis study). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 5705-5712.
- Makkira, M., Syakir, M., Kurniawan, S., Sani, A., & Ngandoh, A. M. (2022). Pengaruh Stres Kerja, Komunikasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT. Prima Karya Manunggal Kabupaten Pangkep. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 2(1), 20-27.
- Asriani, A., Putri, N., Kurniawan, S., & Sani, A. (2022). Pengaruh Personal Selling terhadap Peningkatan Penjualan Alat Tulis pada CV. Etalase Mitra Jaya di Wajo pada Masa Lockdown Pandemi Covid 19. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 2(1), 13-19.
- Oktavia, E., Hernawati, E., & Suwartika Kusumadiarti, R. (n.d.). *PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI STANDAR SATUAN HARGA BARANG DI PEMERINTAH KOTA CIMAHI*.

Analisis Standar Satuan Harga (SSH) Pada Penyusunan Anggaran..

*Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2020. (n.d.).*

Putri Ayu, N. S. A. J. J. (2020). *ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN DAN PENERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Serta Standar Biaya Dilingkungan Pemerintahan Kota Gorontalo